

**IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PERANAN
DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG GUNUNG SIRIMAU,
KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU**

***IDENTIFICATION OF STAKEHOLDERS AND ROLES IN
PROTECTED FOREST MANAGEMENT OF MOUNT SIRIMAU,
AMBON CITY, MALUKU PROVINCE***

Oleh

Evelin Parera^{1*)} Ris Hadi Purwanto²⁾, Dwiko Budi Permadi³⁾, Sumardi⁴⁾

^{1,2,3,4)}Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Jln. Agro, Bulaksumur No. 1 Kocoran, Caturtunggal Kec. Depok, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55281

Email: evlinparera@gmail.com

Diterima: 18 Januari 2022	Disetujui: 23 April 2022
---------------------------	--------------------------

Abstrak

Pengelolaan hutan lindung menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengannya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan perannya dalam pengelolaan hutan lindung. Penelitian dilakukan pada Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau, Provinsi Maluku. Pengumpulan data menggunakan pengisian kuesioner, wawancara mendalam, observasi dan data sekunder. *Purposive sampling* untuk instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dan metode snow ball untuk pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil identifikasi didapati Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Pengelolaan hutan lindung di Pulau Ambon diintervensi oleh instansi dan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kehutanan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pemangku kepentingan lain yang memberikan kontribusi seperti Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi keagamaan, Akademisi, Instansi di luar lingkup Kehutanan seperti Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat Bidang Tata Ruang. Peran pemangku kepentingan sebagai pengelola hutan lindung, *intervenor*, fasilitator, partisipan, evaluator, tim pakar, pengguna sumberdaya hutan dan perencana tata ruang.

Kata kunci: *Identifikasi; peran; Hutan lindung; Pemangku kepentingan*

Abstract

Protected forest management is the responsibility of all stakeholders related to it. This study aims to identify stakeholders and their roles in protected forest management. The research was conducted in the Mount Sirimau Protection Forest Group, Maluku Province. Collecting data using questionnaires, in-depth interviews, observation and secondary data. Purposive sampling for agencies that have the main tasks and functions and the snow ball method for other stakeholders involved in protected forest management. Data analysis is descriptive qualitative. The results of the identification found the Technical Implementation Unit of the Ambon Island Forest Management Unit and the Lease Islands. Management of protected forests on Ambon Island is intervened by agencies and Technical Implementing Units within the scope of Forestry according to their main duties and functions. Other contributing stakeholders such as Community Social Institutions, Community Organizations, Religious Organizations, Academics, Agencies outside the scope of Forestry such as Public Works and People's Settlements in the Spatial Sector. The role of stakeholders as managers, intervenors, facilitators, participants, evaluators, expert teams, forest resource users and spatial planners.

Keywords: *Identification, roles, Protected forest, Stakeholders*

PENDAHULUAN

Hutan lindung berfungsi sebagai penyanggah kehidupan memiliki jasa ekosistem. Aliran jasa ekosistem seringkali tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi membutuhkan kontribusi manusia (Díaz *et al.*, 2018; Albert *et al.*, 2016; Burkhard *et al.*, 2014; UK NEA, 2011). Kontribusi tersebut seperti "input lain" (Burkhard *et al.*, 2014) yaitu, "input manusia" (Albert *et al.*, 2016; Von Haaren *et al.*, 2014), "modal sosial dan manusia" (Daniel *et al.*, 2012), "proses sosial" (Spangenberg *et al.*, 2014), atau "aktivitas manusia" (Huntsinger dan Oviedo, 2014). Oleh karena itu campur tangan manusia juga berperan penting untuk menjaga ekosistem (Gissi dan Garramone, 2018; Raymond *et al.*, 2017; Berb es-BI azquez *et al.*, 2016; Fischer dan Eastwood, 2016; Palomo *et al.*, 2016; Jericó-Daminello *et al.*, 2021). Manusia yang berperan sebagai pemangku kepentingan dapat menjadi aktif dalam ikut memproduksi jasa ekosistem (Rova dan Pravoni, 2017; Loft *et al.*, 2015; Opdam *et al.*, 2015). Hal tersebut harus diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya alam secara umum.

Keberhasilan atau kegagalan pengelolaan sumber daya alam sangat dipengaruhi banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sebuah pengelolaan sumber daya alam adalah para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah individu, lembaga atau kelompok yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap suatu program atau

kegiatan, atau yang mempengaruhi atau dipengaruhi secara positif atau negatif oleh pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan (Puspitojati *et al.*, 2012). Namun yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung di Kota Ambon masih secara parsial, dan hal ini akan memicu terjadinya konflik sosial yang disebabkan banyaknya para pihak yang terlibat.

Pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam perlu diatur dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya alam. (Syahputra *et al.*, 2018) menyebutkan bahwa konsep manajemen pemangku kepentingan adalah bagaimana mengelola para pihak secara efektif untuk mewujudkan tujuan strategis. Oleh karena itu, pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan sumber daya alam perlu diatur dengan baik secara komprehensif dan kolaboratif agar mencapai tujuan pengelolaan hutan lindung.

Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dan peranannya dalam pengelolaan kelompok hutan lindung Gunung Sirimau.

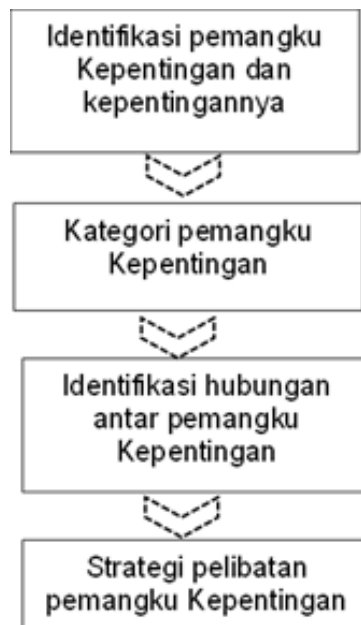
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Hutan Gunung Sirimau. Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau diambil sebagai lokasi penelitian karena merupakan lokasi yang strategis yang berlokasi pada hulu Kota Ambon. Jika tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi bagian hilir Kota Ambon sebagai tempat aktifitas sosial, ekonomi dan

pelayanan publik.

Metode pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* dan *Snowball sampling*. Metode *Purposive Sampling* digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan pada instansi terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan hutan lindung Kelompok Hutan Gunung Sirimau. Metode *Snowball sampling* digunakan untuk mengidentifikasi *stakeholder* seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, pemerhati lingkungan dan lain-lain yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang khusus namun berkontribusi, terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan hutan lindung

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan alat perekam. Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi kuesioner, wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi lapangan dan penelusuran dokumen terkait dengan tujuan penelitian. Kuesioner yang digunakan berisikan identitas responden, tugas pokok dan fungsi, peran dalam pengelolaan hutan lindung. Pengolahan data mengikuti proses mengidentifikasi pemangku kepentingan mengikuti prosedur langkah-langkah analisis pemangku kepentingan (ODA, 1995; Reed et al., 2009; Ackermann, 2011; Aaltonen, 2011) sebagai berikut :



Gambar 1. Skema langkah-langkah analisis pemangku kepentingan (ODA, 1995; Reed et al., 2009; Ackermann, 2011; Aaltonen, 2011, Modifikasi, 2020)

Penelitian ini hanya fokus pada langkah identifikasi pemangku kepentingan dan peranan dalam pengelolaan hutan lindung. Metode analisis data menggunakan metode

deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Analisis data dilakukan dengan mengkaji hasil kuesioner, yang dijelaskan berdasarkan hasil wawancara yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau

Hasil analisis pemangku kepentingan dapat digunakan sebagai bahan dalam mendukung proses perencanaan, implementasi, atau evaluasi proyek (Overseas Development Administration [ODA], 1995). Pemangku kepentingan dan peranannya dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilihat pada Tabel 1. Pemangku kepentingan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok pemangku kepentingan, yaitu pemangku kepentingan kunci, utama dan pendukung (ODA, 1995; Mulyaningrum, 2013; Nurfatriani, et al., 2015). Pemangku kepentingan utama (*primary stakeholder*), merupakan pemangku kepentingan yang secara langsung terkena dampak, baik positif maupun negatif dari adanya pengelolaan hutan lindung. Pemangku kepentingan kunci (*key stakeholder*) merupakan pemangku kepentingan yang secara legalitas memiliki kewenangan atau dengan kata lain memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengelolaan hutan lindung. Pemangku kepentingan pendukung (*secondary stakeholder*), merupakan pemangku kepentingan sebagai perantara dalam pengelolaan hutan lindung ataupun pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan secara langsung tetapi memiliki kepedulian pengelolaan hutan lindung.

Pemangku kepentingan utama adalah aktor utama di wilayah ini dalam hal

kekuasaan dan legitimasi (ODA, 1995). Pemangku kepentingan utama adalah penerima manfaat dari rencana dengan lebih sedikit kekuasaan dan legitimasi, dan pemangku kepentingan sekunder adalah aktor yang secara marjinal terlibat dalam masalah ini (ODA, 1995). Stakeholder kunci harus dapat mewakili kepentingan budaya, sosial, dan ekonomi utama masyarakat, untuk memiliki dialog yang konstruktif, dan untuk menjadi orang yang dihormati yang memungkinkan difusi informasi baru (Prell et al., 2013). Stakeholder primer mencakup penerima manfaat proyek yang dituju, dan pihak lain yang secara positif atau negatif terkena dampak langsung proyek; sementara pemangku kepentingan sekunder adalah perantara yang dapat memengaruhi hasil proyek (ODA, 1995).

Pemangku kepentingan yang teridentifikasi pada tiga kelompok tersebut adalah :

- a. Pemangku kepentingan kunci adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; Dinas Kehutanan Provinsi Maluku; Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; UPT. Balai Pengelolaan DAS Wae Apu Batumerah. Keempat instansi ini merupakan pemangku kepentingan kunci karena memiliki kewenangan untuk mengelola Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau.

Peranan masing-masing pemangku

kepentingan tersebut :

- UPTD. KPH Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau dikelola oleh Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Maluku, kemudian setelah adanya Peraturan Otonomi Daerah, Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau dikelola oleh Dinas Kehutanan Kota Ambon sampai dengan tahun 2016. Pengelolaan oleh UPTD. KPH Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease belum berjalan sesuai harapan, hal ini disebabkan belum finalnya penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sebagai dokumen salah satu syarat beroperasinya sebuah KPH.
 - Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah melakukan kegiatan penetapan hutan adat di Negeri Hutumuri dan Negeri Hukurila.
 - UPT. Balai Pengelolaan DAS Wae Apu Batumerah termasuk dalam pemangku kepentingan kunci. melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dalam Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau di Negeri Soya.
- b. Pemangku kepentingan pendukung merupakan pemangku kepentingan yang mendukung proses pengelolaan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau. Pemangku kepentingan pendukung terdiri

dari : UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku; UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam; Akademisi; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon; Organisasi Masyarakat; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut :

- UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku (BPKH) sebagai fasilitator dalam penyusunan RPHJP
- UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) sebagai partisipan dalam penyusunan RPHJP
- Akademisi sebagai tim pakar penyusunan dokumen RPHJP.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon memberikan dukungan dalam rencana pengelolaan terkait dengan pembiayaan kegiatan pengelolaan hutan lindung.
- Organisasi Masyarakat memberikan dukungan secara insidental mengadakan kegiatan penanaman dalam rangka merayakan hari besar, hari raya atau program kerja organisasi.

- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bertugas untuk menyusun rencana tata ruang Provinsi Maluku.
- c. Pemangku kepentingan utama adalah masyarakat adat. Masyarakat adat berinteraksi langsung dengan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau. Peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adalah menjaga keamanan hutan lindung melalui peranan lembaga *kewang* (polisi adat).

Tabel 1. Pemangku kepentingan dan peranannya dalam pengelolaan hutan lindung pada kelompok hutan lindung Gunung Sirimau

No	Pemangku Kepentingan	Peran	Derajat Pengaruh	Derajat Kepentingan
1	UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola 	Tinggi	Tinggi
2	Dinas Kehutanan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintervensi • Fasilitator • Evaluator 	Tinggi	Tinggi
3	UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator • Partisipan 	Tinggi	Rendah
4	UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintervensi • Fasilitator 	Tinggi	Tinggi
5	UPT. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wae Apu Batu Merah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintervensi • Fasilitator 	Tinggi	Tinggi
6	UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipan 	Rendah	Rendah
7	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator • Evaluator 	Tinggi	Rendah
8	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator • Evaluator 	Tinggi	Rendah
9	Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pakar • Partisipan 	Rendah	Rendah
10	Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna sumberdaya hutan • Partisipan 	Rendah	Tinggi
11	Organisasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipan 	Rendah	Rendah

No	Pemangku Kepentingan	Peran	Derajat Pengaruh	Derajat Kepentingan
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perencana Tata Ruang • Fasilitator 	Tinggi	Rendah

Peran Pemangku Kepentingan Pengelolaan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau

Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (KBBI). Peran pemangku kepentingan dapat diketahui melalui analisis *stakeholder* (Wakka et al., 2014). Tabel 1 menunjukkan cukup banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kelompok hutan lindung Gunung Sirimau dengan berbagai peran yaitu sebagai

pengelola, *intervenor*, partisipan, pakar, perencana tata ruang, fasilitator dan pengguna sumberdaya dengan tingkat (derajat) kepentingan dan pengaruh yang berbeda. Ada yang derajat kepentingan dan pengaruh yang tinggi, derajat kepentingan tinggi tapi derajat pengaruh rendah dan sebaliknya. Tinggi rendahnya derajat kepentingan dan pengaruh ditentukan oleh tingkat kewenangan dalam pengelolaan hutan lindung berdasarkan aturan, tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan tersebut.

KESIMPULAN

1. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung terdiri : 1) Pemangku kepentingan kunci adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; Dinas Kehutanan Provinsi Maluku; Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; UPT. Balai Pengelolaan DAS Wae Apu Batumerah; 2) Pemangku kepentingan pendukung merupakan pemangku kepentingan yang mendukung proses pengelolaan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau. Pemangku kepentingan pendukung terdiri dari : UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku;

UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam; Akademisi; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon; Organisasi Masyarakat; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 3) Pemangku kepentingan utama adalah masyarakat adat.

2. Peran pemangku kepentingan sebagai pengelola hutan lindung, *intervenor*, fasilitator, partisipan, evaluator, tim pakar, pengguna sumberdaya hutan dan perencana tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaltonen, K. (2011). Project stakeholder analysis as an environmental interpretation process. *International Journal of Project Management*, 29(2), 165–183. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2010.02.001>
- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. *Long Range Planning*, 44(3), 179–196. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001>
- Albert, C., Bonn, A., Burkhard, B., Daube, S., Dietrich, K., Engels, B., Frommer, J., Götzel, M., Grêt-Regamey, A., Job-Hoben, B., Koellner, T., Marzelli, S., Moninger, C., Müller, F., Rabe, S.-E., Ring, I., Schwaiger, E., Schweppe-Kraft, B., Wüstemann, H. (2016). Towards a national set of ecosystem services indicators: Insights from Germany. *Ecol. Ind.* 61 (1), 38–48. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.08.050>.
- Berbé-Balazquez, M., González, J.A., Pascual, U. (2016). Towards an ecosystem services approach that addresses social power relations. *Curr. Opin. Environ. Sustainability* 19, 134–143. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.02.003>.
- Burkhard, B., Kandziora, M., Hou, Y., Müller, F. (2014). Ecosystem service potentials, flows and demands – concepts for spatial localisation. *Indication Quantif.* 34 (1), 1–32. <https://doi.org/10.3097/LO.201434>
- Daniel, T.C., Muhar, A., Arnberger, A., Aznar, O., Boyd, J.W., Chan, K.M.A., Costanza, R., Elmqvist, T., Flint, C.G., Gobster, P.H., Grêt-Regamey, A., Lave, R., Muhar, S., Penker, M., Ribe, R.G., Schauppenlehner, T., Sikor, T., Soloviy, I., Spierenburg, M., Taczanowska, K., Tam, J., von der Dunk, A., (2012). Contributions of cultural services to the ecosystem services agenda. *PNAS* 109 (23), 8812–8819. <https://doi.org/10.1073/pnas.1114773109>.
- Díaz, S., Pascual, U., Stenseke, M., Martín-López, B., Watson, R.T., Molnár, Z., Hill, R., Chan, K.M.A., Baste, I.B., Brauman, K.A., Polasky, S., Church, A., Lonsdale, M., Larigauderie, A., Leadley, P.W., van Oudenhoven, A.P.E., van der Plaats, F., Schröter, M., Lavorel, S., Aumeeruddy-Thomas, Y., Bukvareva, E., Davies, K., Demissew, S., Erpul, G., Failler, P., Guerra, C.A., Hewitt, C.L., Keune, H., Lindley, S., Shirayama, Y. (2018). Assessing nature's contributions to people. *Science* 359 (6373), 270–272. <https://doi.org/10.1126/science.aap8826>.
- Fischer, A., Eastwood, A. (2016). Coproduction of ecosystem services as human–nature interactions—an analytical framework. *Land Use Policy*. 52, 41–50. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.12.004>.
- Gissi, E., Garramone, V. (2018). Learning on ecosystem services co-production in decision-making from role-playing simulation: comparative analysis from Southeast Europe. *Ecosyst. Serv.* 34, 228–253. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.03.025>
- Huntsinger, L., Oviedo, J.L. (2014). Ecosystem services are social–ecological services in a traditional pastoral system: the case of California's Mediterranean rangelands. *Ecol. Soc.* 19 (1), 8. <https://doi.org/10.5751/ES-06143-190108>.
- Jericó-Daminello, C., Schröter, B., Mancilla Garcia, M., & Albert, C. (2021). Exploring perceptions of stakeholder roles in ecosystem services coproduction. *Ecosystem Services*, 51(August). <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101353>
- Khatun.
- Loft, L., Mann, C., Hansjürgens, B. (2015). Challenges in ecosystem services governance: multi-levels, multi-actors, multi-rationalities. *Ecosyst. Serv.* 16, 150–157. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.11.002>.

- Mulyaningrum, Kartodihardjo, H., Jaya I. N. S., Bramasto, N. (2013). Stakeholders Analysis of Policy-Making Process : The Case of Timber Legality Policy on Private. *JMHT*, XIX(August), 156–162. <https://doi.org/10.7226/jtfm.19.2.156>
- Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., & Yustika, A. E. (2015). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau (Stakeholder Analysis in Green Fiscal Policy Transformation). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12 (2), 105–124.
- Opdam, P., Albert, C., Fürst, C., Gr̄et-Regamey, A., Kleemann, J., Parker, D., La Rosa, D., Schmidt, K., Villamor, G.B., Walz, A., (2015). Ecosystem services for connecting actors – lessons from a symposium. *Change Adapt. Socio-Ecol. Syst.* 2 (1), 1–7. <https://doi.org/10.1515/cass-2015-0001>.
- Overseas Development Administration [ODA]. (1995). Guidance Note on how to Do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes. Overseas Development Administration, Social Development Department, 10 p.
- Palomo, I., Felipe-Lucia, María., Bennett, E., Martín-López, Berta., Pascual, U. (2016). Disentangling the Pathways and Effects of Ecosystem Service Co-Production. *Advances in Ecological Research*. Vol. 54. <https://doi.org/10.1016/bs.aecr.2015.09.003>
- Prell, C., Klaus, H., & Reed, M. S. (2013). Stakeholder analysis and social network analysis in natural resource management Stakeholder Analysis and Social Network Analysis in Natural Resource Management. May 2016. <https://doi.org/10.1080/08941920802199202>
- Puspitojati, T., Darusman, D., Tarumingkeng, R. C., & Purnama, B. (2012). Pemangku Kepentingan yang Perlu Diberdayakan dalam Pengelolaan Hutan Produksi: Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(3), 190–204.
- Raymond, C.M., Giusti, M., Barthel, S. (2017). An embodied perspective on the co- production of cultural ecosystem services: toward embodied ecosystems. *J. Environ. Plann. Manage.* 61 (5-6), 778–799. <https://doi.org/10.1080/09640568.2017.1312300>.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who’ s in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90 (5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>.
- Rova, S., Pravoni, F. (2017). Analysis and management of multiple ecosystem services within a social-ecological context. *Ecol. Ind.* 72, 436–443. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.07.050>.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung.
- Spangenberg, J.H., Ḡorg, C., Truong, D.T., Tekken, V., Bustamante, J.V., Settele, J., (2014). Provision of ecosystem services is determined by human agency, not ecosystem functions. Four case studies. *Int. J. Biodivers. Sci., Ecosyst. Serv. Manag.* 10 (1), 40–53. <https://doi.org/10.1080/21513732.2014.884166>.
- Syahputra, H. O. K., Nugroho, B., Hartodihardjo, H., & Santoso, N. (2018). Stakeholder analysis in community based mangrove management: Case of forest management unit in region 3 of Aceh province. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 24(3), 152–161. <https://doi.org/10.7226/jtfm.24.3.152>.
- UK National Ecosystem Assessment [UK NEA]. (2011). Ecosystem Service. <http://uknea.unep-wcmc.org/EcosystemAssessmentConcepts/EcosystemServices/tabid/103/Default.aspx> (diakses 14 Januari 2022)

Von Haaren, C., Albert, C., Barkmann, J., de Groot, R.S., Spangenberg, J.H., Schröter- Schlaack, C., Hansjürgens, B., (2014). From explanation to application: introducing a practice-oriented ecosystem services evaluation (PRESET) model adapted to the context of landscape planning and management. *Landscape Ecol.* 29 (8), 1335–1346. <https://doi.org/10.1007/s10980-014-0084>.

Wakka, A. K., Awang, S. A., Purwanto, R. H., and Poedjarahajoe, E. (2014). Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 20(1):11–21. DOI:10.22146 /jml.18470